

**PARADIGMA ORANG YANG BERINTELEK  
DALAM KONSEKUENSI HUKUM DI KALANGAN PESERTA DIDIK  
Oleh: Dewi Sri Merdekawati**

**Abstrak**

Pendidikan di Indonesia masih berkembang dalam standar biasa. Ini menjadi momok jika para pendidik tetap diam terhadap peserta didik yang bermasalah. Pengajar mengharapkan konsisten dalam mendorong yang jelas seperti orang tua harus berpartisipasi agar anaknya berkembang juga sukses untuk masa depan dan generasi mendatang.

Kata Kunci : Anak, Momok

**I. PENDAHULUAN**

Kehidupan dalam dunia pendidikan ibarat kita hidup dalam dunia. Dari dalam kandungan, bayi, balita, balita, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, paruh baya, tua, dan lansia. Dari dasar pendidikan itu adalah kerja membangun manusia supaya dia bisa berusaha melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar-manusia, serta antara manusia dengan Tuhan melalui pendidikan terjadi proses di mana suatu kompleks pengetahuan dan kecakapan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Setiap generasi baru pada gilirannya akan menggali dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukannya untuk merespon dan mengatasi tantangan yang tidak dikenal lewat pendidikan pengetahuan dan kecakapan terdahulu.

- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisah-pisahkan, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan dunianya.

Berdasarkan UU 20/2003 fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU 20/2003, pasal 3). Pendidikan dengan demikian pada dasarnya merupakan sarana proses humanisasi, proses pemberdayaan, dan sosialisasi dalam kerangka mana terjadi proses pembangunan manusia yang inovatif, berdaya kritik, berpengetahuan, berkepribadian, dan taat azas (Zainuddin, 2010).

Dalam konteks globalisasi pendidikan harus mampu mempertahankan budaya dan jati diri bangsa di tengah-tengah gencarnya gempuran beragam budaya dan peradaban bangsa lain. Sebagai sebuah Negara yang kaya akan budaya yang beraneka ragam (heterogen), Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri dalam arti sanggup

memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, cita-cita, dan impiannya.

### **Falsafah Pendidikan**

Pemahaman mengenai pendidikan itu berubah dari waktu ke waktu serta dari pendidik yang satu ke pendidik yang lain. Kendati demikian, pendidikan itu pada dasarnya bisa dipahami sebagai proses, dimana pendidik melakukan transfer pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai kepada peserta didik dalam suatu proses pembentukan kemampuan fisik (yang sehat). Kemampuan nalar (yang cerdas) maupun karakter (yang utama), melalui suatu proses yang merupakan upaya sosialisasi dan enkulturasi yang terlembaga, baik dalam ranah formal, nonformal, dan informal.

Dalam kerangka konsep Ki Hajar Dewantara pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia dalam arti membantu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang, menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif).

Ki Hajar Dewantara juga meninggalkan pesan mengenai jangkauan pendidikan yang siap bahkan untuk masa depan, hampir seabad yang lalu: “pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang”.

Masih sezaman dengan Ki Hajar Dewantara, Engkoe Mohammad Sjafei yang mendirikan “Perguruan Ruang Pendidik INS Kayutanam” pada tahun 1926 di desa Kayutanam di Sumatera Barat juga pendidikan sebagai upaya lengkap. Dalam rangka itu Engkoe Mohammad Sjafei mengajukan lima sasaran utama dari upaya pendidikan, yaitu: a) kemerdekaan berpikir (dalam bentuk inovasi/kreativitas), b) pengembangan ilmu pengetahuan, talenta/bakat (sebagai rahmat Tuhan), dan potensi diri, c) kemandirian dan wirausaha, d) etos kerja, serta e) akhlak mulia (sebagai pengejawantahan dari agama, etika, dan estetika).

### **Paradigma Pendidikan**

Thomas Khun (1922-1996) adalah orang pertama yang merumuskan paradigma ilmu dalam disiplin epistemologi sebagai kerangka teoritis, atau suatu cara memandang dan memahami alam yang telah digunakan oleh komunitas ilmuwan sebagai pandangan dunianya. Paradigma ilmu ini berfungsi sebagai lensa, sehingga melalui lensa ini para ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang masing-masing dan jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut.

Paradigma diartikan sebagai alam disiplin intelektual, yaitu cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas pada sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.

Dengan pengertian-pengertian di atas, Paradigma Pendidikan dan Pradigma Pendidikan Nasional dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

*“Paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut.”*

*“Paradigma pendidikan nasional adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan nasional, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan nasional, dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut.”*

Ke dalam cara pandang itu termasuk tantangan dasar yang dihadapi manusia dalam kaitannya dengan tata sosial, kebudayaan serta lingkungan alamnya.

Konsep Paradigma pendidikan Nasional yang disusun di sini akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta pelaksanaannya, dan melibatkan pula penentuan persyaratan pelaksana-pelaksananya. Dalam mengacu ke masa depan, pelaksanaan pendidikan memperhitungkan pengaruh dari berbagai sumber belajar, termasuk yang berkembang di dunia maya. Paradigma pendidikan nasional yang dirumuskan di sini, didasarkan pada tujuan, dan yang diharapkan dari hasil pendidikan kita yang akan datang.

## II. KAJIAN TEORI

Dalam buku bertajuk *‘How Communities Build Stronger Schools’*, Anne Wescott dan Jean L. Konzal menggambarkan pola hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam tiga paradigmat yang mengalami perubahan dan perkembangan. Ketiga paradigmat hubungan tripusat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Paradigma Lama

Orangtua dalam keluarga, warga sekolah, dan warga masyarakat memiliki hubungan sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam urusan pendidikan. Dalam paradigma lama ini, hubungan tripusat pendidikan ini berlangsung sebagai satuan pranata sosial yang berdiri sendiri dan berada dalam posisi yang terpisah-pisah. Menurut Anne Wescott dan Jean L. Konzal, paradigma ditandai dengan adanya beberapa karakteristik sebagai berikut: 1) *menitikberatkan pada kecakapan akademik dan pengetahuan*, 2) *hubungan sekolah terkontrol, komunikasi satu arah*, 3) *birokratis, impersonal, dan terjadi komunikasi satu arah*, 4) *saling melindungi diri, defensif*, 5) *hirarkis, tidak semua orang dipandang sama*, 6) *perbedaan kultural dan sosial tidak mendapatkan perhatian secara wajar*, 7) *beberapa keluarga dan siswa termarginalisasi*, 8) *orangtua dipandang sebagai sumber masalah dan kritik*, dan 9) *masyarakat dipandang sebagai orang lain, kecuali diperlukan*.

Guru dan warga sekolah dalam paradigma lama ini pada umumnya masih berkuat pada pertanyaan, *“What can parents, community members, and organizations do for us?”* Apa yang orangtua, warga masyarakat hanya berupa uang transport atau baju seragam atau honorarium kelebihan jam mengajar. Jadi, guru dan warga sekolah masih terfokus pada dukungan finansial dari keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, keluarga dan warga masyarakat pun sudah merasa telah memberikan peran utamanya, jika ia telah memberikan dukungan finansial kepada sekolah. Masalah proses belajar mengajar, urusan belajar anak di rumah, pembinaan moral peserta didik, seluruhnya telah diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Orangtua dan masyarakat hanya ingin tahu bahwa anaknya lulus dengan nilai yang tinggi. Kalau kemudian ada anak yang perilakunya tidak baik, atau tidak dapat mencapai standar kelulusan, orangtua dan masyarakat akan segera mengembalikan tanggung jawab semua itu kepada sekolah.

## 2. Paradigma Transisional

Dalam paradigma transisional, hubungan antara sekolah dan orangtua telah berkembang sebagai hubungan kerja sama yang sudah interaktif. Pola hubungan dalam paradigme transisional ini memiliki beberapa karakteristik yang agak berbeda dengan karakteristik paradigma lama, antara lain adalah: 1) *menitikberatkan pada penguasaan akademik dan perkembangan individual siswa*, 2) *hubungan sekolah diarahkan*, 3) *kurang birokratis, lebih manusiawi, dan telah terjadi hubungan dua arah*, 4) *proaktif*, 5) *lebih inklusif*, 6) *perbedaan kultural dan sosial sudah memperoleh perhatian*, 7) *kerja sama dengan orangtua sudah terbentuk secara terbatas*, 8) *menjalin hubungan dengan masyarakat jika bermanfaat kepada sekolah*, dan 9) *guru mulai mengadakan penelitian tentang kegiatan belajar mengajar tetapi belum melibatkan orangtua dalam proses ini*.

Beberapa karakteristik paradigma lama sudah mulai mengalami perubahan, meski belum secara total. Sebagai contoh, perhatian orangtua dan masyarakat terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu sudah mulai tumbuh. Dengan demikian, lembaga pendidikan sekolah sudah tidak terlalu birokratis lagi. Sekolah sudah menjadi lebih inklusif.

Dalam konteks paradigma transisional, sekolah dan keluarga menanyakan kepada diri dan masyarakat “*how can parents, community members, organization helps us do our job better*” atau “bagaimana orangtua, warga masyarakat, organisasi sosial dapat membantu kita untuk melaksanakan tugas secara lebih baik”.

## 3. Paradigma Baru

Karakteristik hubungan tripusat pendidikan dalam paradigma baru ini telah benar-benar berubah secara total, yang berbeda dengan paradigme sebelumnya, yakni: 1) *menitikberatkan perhatian pada siswa secara keseluruhan, baik aspek akademis maupun perkembangan individualnya*, 2) *tidak ada batas hubungan antar keluarga, sekolah, dan masyarakat*, 3) *terjadi budaya menemukan, belajar, melindungi, dan membimbing: guru dan orangtua melaksanakan penelitian tindakan bersama-sama*, 4) *keikutsertaan secara personal*, 5) *tidak hirarkis, sepenuhnya inklusif, setiap orang merasa dirangkul*, 6) *perbedaan budaya dan sosial dihargai dan dipelihara dengan baik*, 7) *terdapat kerjasama antara orangtua dan masyarakat*, 8) *orangtua dan warga masyarakat sebagai partner*, 9) *menemukan manfaat bersama sebagai tujuan*, 10) *pilihan banyak dan cara untuk mencapainya juga banyak*.

Dalam paradigma baru ini, semua orang (orangtua dalam keluarga, kepala sekolah dan guru di sekolah, serta warga masyarakat) secara bersama-sama mengajukan pertanyaan tentang “*what can all of us together do to educate all children well*” atau tentang “apa yang kita dapat kerjakan bersama untuk mendidik semua anak dengan baik”. Dalam hal ini, pertanyaan tentang bagaimana cara mendidik peserta didik itu tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab profesional para pendidik dan kepala sekolah dan tenaga administrasi di sekolah saja, melainkan telah melibatkan peran serta secara sinergis dari semua *stakeholder* pendidikan. Dengan kata lain, pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholder*) tidak lagi pernah menyebut “murid saya”, atau “siswa saya”, atau “siswa-siswa itu” atau “anak-anak saya”, melainkan dengan sebutan kolektif “anak-anak kita”.

Dengan demikian, paradigma baru tentang hubungan tripusat pendidikan ini telah memandang lembaga pendidikan sekolah sebagai milik bersama. Dengan kata lain, tidak ada lagi *single fighter*” dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan kajian teoritis-ilmiah tersebut di atas, paradigma hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat di Indonesia masih dalam paradigme lama dan mulai berubah ke paradigme transisional. Beberapa indikasi utama dapat disebutkan sebagai berikut:

### **1. Keluarga, sekolah, dan masyarakat masih memandang hasil belajar siswa lebih pada sisi kecakapan akademik dan pengetahuan.**

Nuansa akademik masih lekat dalam pandangan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan siswa dalam pendidikan lebih diukur nuansa akademik masih lekat dalam pandangan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan siswa dalam pendidikan lebih diukur dari aspek akademis semata-mata. Orangtua, sekolah, dan masyarakat merasa sudah melaksanakan tugas pendidikan jika anak-anak telah berhasil menggondol juara kelas atau menduduki peringkat satu dalam aspek akademis. Aspek-aspek yang berkenaan dengan perkembangan kepribadian anak, disiplin, moralitas. Aspek-aspek yang berkenaan dengan perkembangan kepribadian anak, disiplin, moralitas, dan perhatian yang sama. Kelahiran Kurikulum Berbasis Kompetensi pada hakikatnya bertujuan mengurangi orientasi akademis dengan menekankan aspek kompetensi dalam seluruh aspek kemampuan siswa.

### **2. Hubungan keluarga dan sekolah masih bersifat satu arah, birokratis, dan hirarkis.**

Hubungan seperti ini masih kental dalam kegiatan sekolah. Orangtua siswa akan datang ke sekolah dalam acara panggilan resmi dari kepala sekolah karena ada masalah yang berkenaan dengan kenalan siswa masih bersifat birokratis. Dengan kata lain, hubungan sekolah dan orangtua siswa masih bersifat satu arah, yakni dari sekolah kepada orangtua siswa. Belum banyak arah yang sebaliknya. Paling-paling surat pemberitahuan karena anaknya sakit, atau memintakan izin anak karena ada keperluan keluarga. Belum ada misalnya surat dari warga masyarakat atau orangtua yang berisi evaluasi atau masukan kepada sekolah.

Dalam paradigma lama, sekolah dipandang sebagai unit birokratis yang terendah dalam satu hierarkis organisasi departemen pendidikan. Sebagai unit birokratis, keluarga, sekolah dan masyarakat hanya merupakan insidental, temporer, bukan komitmen abadi untuk kepentingan generasi muda bangsa.

Berdasarkan gambaran singkat tentang pola hubungan tripusat pendidikan tersebut, maka kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah memiliki landasan teoritis-ilmiah yang cukup kuat. Diharapkan kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat memperbaiki pola hubungan tripusat pendidikan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang sesuai dengan paradigma baru.

Beberapa karakteristik dalam paradigma lama memang masih melekat dalam hubungan tripusat pendidikan di Indonesia. Namun demikian, di beberapa sekolah swasta di Indonesia pola hubungan itu mungkin lebih maju dibandingkan dengan di sekolah negeri. Hal ini terjadi, karena sekolah negeri di masa lalu lebih banyak memperoleh perhatian dan bantuan yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta. Sementara kehidupan sekolah swasta amat ditentukan oleh peran serta orangtua dan masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak boleh tidak sekolah swasta harus dapat menggandeng orangtua dan masyarakat untuk menyatu secara sinergis dalam membangun sekolah dan meningkatkan mutu pendidikannya. Sekolah dan orangtua serta masyarakat dalam posisi yang saling memerlukan.

Pola hubungan tripusat pendidikan diharapkan akan berubah menjadi lebih baik dengan pembentukan Dewan Pendidikan dan komite Sekolah, yang menjadi wadah peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan catatan, lembaga itu tidak hanya sekedar menjadi stempel sekolah, seperti yang terjadi dengan BP3 atau POMG di masa lalu.

Sebagai contoh, inilah yang terjadi di satu Sekolah Dasar yang boleh disebut telah mulai menerapkan paradigm baru ini. Menjelang kegiatan ulangan semester, semua orangtua siswa diundang ke sekolah. Dalam arena pertemuan yang sengaja dibuat tidak formal itu, semua siswa dan didampingi oleh masing-masing orangtuanya bertatap muka dengan kepala sekolah dan semua guru. Kepala sekolah menjelaskan tentang rencana kegiatan ulangan semester itu, yang menurut jadwal kurang dua minggu lagi. Akan lebih baik lagi jika jadwal ini dapat dilihat setiap hari pada papan pengumuman di halaman sekolah. Bunyinya “Ulangan semester kurang 14 hari”. Setiap hari papan pengumuman ini akan diganti menjadi “kurang 13 hari lagi”, “kurang 12 hari lagi” dan seterusnya. Sehari kemarin papan pengumuman itu masih tertulis “Ulangan Semester 15 hari lagi”. Pada saat papan pengumuman diundang ke sekolah untuk memperoleh penjelasan dari kepala sekolah tentang apa yang telah dilakukan sekolah selama ini dan apa saja yang perlu dilakukan oleh restu kepada siswa. Acara diakhiri dengan acara permohonan doa restu anak-anak kepada orangtua dan kepada semua gurunya dengan cara saling berjabat tangan.

Ini merupakan satu profesi yang terjadi di satu sekolah dasar swasta terkenal di Yogyakarta. Contoh tersebut minimal dapat dijadikan satu model atau bahan diskusi lebih lanjut tentang apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Semua itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan pendidikan siswa, anak-anak pewaris masa depan bangsa.

Dalam dokumen Renstra Kemendiknas 2010-2014 (Permendiknas RI Nomor 2 Tahun 2010), penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

### **1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya**

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk tuhan).

### **2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik**

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

### **3. Pendidikan untuk Semua**

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

### **4. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)**

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk dan yang buruk, termasuk pembangunan.

Definisi intelek adalah <sup>1</sup> *daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan, daya akal budi, kecerdasan berpikir,* <sup>2</sup> *terpelajar, cendekia.*

Orang yang berintelekt bisa dikatakan berpendidikan bagi orang sebagian yang mengatakan hal itu tapi banyak pula yang mengatakan orang intelek yang berpendidikan tidak memiliki ilmu.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kaum intelek banyak macamnya bisa dikatakan ada tingkat sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Contoh dari kesemuanya itu adalah pengusaha terkaya di dunia, pengusaha Indonesia, wiraswasta sukses, pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, karyawan, dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar. Seorang pedagang pun bisa dikatakan

orang yang intelek jika menghasilkan sesuatu dan pemulung sukses yang bisa mengubah hidupnya menjadi sejahtera.

Kehidupan makin kesini makin maju pesat. Pengertian yang dulu dianut sekarang berubah dan menjadikan hal yang momok bahkan tidak patut dicontoh tapi di zaman sekarang tahun 2015 ini uang adalah segala-galanya. Tidak hanya tahun 2015 tapi bisa kita lihat 5 tahun ke belakang; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dalam hal uang adalah segalanya. Tidak tahun sekarang bisa jadi tahun berikutnya.

**Ir.Farizal Moenir, M. T. M, Si. (Ketua Yayasan Cakrawala STT TELEMATIKA Bogor)** mengatakan “*orang intelek di Negara Indonesia adalah orang yang menjajah bangsanya sendiri.*”Salah satu contoh orang Indonesia berjudi di negaranya sendiri yang penyelenggaranya adalah kaum orang intelek yang berambisi menghasilkan keuntungan yang besar untuk kepentingan dirinya sendiri. Melihat dari berbagai Negara lain pastinya caranya berbeda tapi tidak untuk membodohkan bangsanya sendiri. Diri pribadi tidak bermaksud membesarkan nama Negara Malaysia. Hal ini bukti nyata Negara Malaysia menyelenggarakan judi tapi khusus orang pribumi atau luar bukan dari penduduk Malaysia. Negara Indonesia salah satunya mengikuti judi ke Negara Malaysia. Kita bandingkan orang Indonesia yang terkaya menyelenggarakan judi di negaranya sendiri itu bisa dikatakan menjajah bangsa dirinya sendiri.

Para pejabat di Indonesia merupakan kaum intelek yang diagung-agungkan masyarakat dan seharusnya menjadi panutan abdi masyarakat. Tapi apakah zaman sekarang berubah hal itu dari tahun ke tahun? Tentu hal ini masyarakat bisa menilai dari media dan kenyataan yang ada. Apakah dari hukuman mereka yang salah diberikan sanksi yang sangat berat? Kenyataan menilai masyarakat perorangan dan komunitas dan menjadi pertanyaan, kenapa pejabat tinggi di Indonesia tidak dihukum seberat-beratnya? Mereka jelas-jelas telah merusak dan berbohong kepada Negara Indonesia khususnya uang rakyat Indonesia. Kenapa orang yang mencuri ayam dihukum penjara dalam kurungan 3 bulan dan denda Rp. 5.000.000,-? Terlihat jawaban-jawaban yang tidak menentu terdakwa pejabat tinggi yang merembet dari berbagai pihak bahkan orang yang tidak terlibat bisa terlibat.

Negara Indonesia menjadi dilema yang amat membingungkan bagi kita semua. Negara lain Negara di dunia pun mengkritik dan memberikan saran pada Negara kita tapi tetap saja Negara Indonesia tidak memperdulikan khususnya bagi orang yang mengelola, membangun Negara Indonesia.

Orang kaum intelek pernah menjadi peserta didik dalam pendidikan. Pikiran dan tindakan yang dicontohkan dari pengajar atau guru memberikan hal yang benar dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anggapan pengusaha seorang intelektual dan pernah menjadi peserta didik berkata, “*Sekarang guru itu sudah komersil*”. Jelas itu pendapat dari sang pengusaha dan pengusaha mengatakan pada dirinya sendiri “*Jelas saya seorang pengusaha wajar jika komersil.*” Perkataan itu menjadi sebuah perasaan yang tajam. Beban seorang guru adalah upaya meningkatkan anak didiknya menjadi pintar dan cerdas. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 **pasal 31** yang berbunyi:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Kalimat itu cukup beban bagi guru. Kita ketahui guru PNS dan guru honor adalah mereka sama guru dan sama sarjana juga dan orang intelek. Ada yang membedakan dari itu nasib mereka berbeda. Guru PNS sangat sejahtera dan guru honor minim jika UMR di kota Bogor. Pengusaha itu tidak tahu bahwa latar belakang guru honor itu kehidupannya sangat tidak sejahtera untuk biaya kuliah pun harus berusaha bekerja sambil kuliah. Jangan

bandingkan dengan guru honor tapi yang latar belakangnya bisa dikatakan berada dan mampu. Guru honor sekarang sejahtera karena mengajar ditempat mengajar sekolah yang bagus dan mahal, itu untuk di kota tetapi jika di pedesaan guru honor gajinya sangat rendah bahkan tidak mencukupi kehidupan sehari-hari karena banyak yang tidak mampu kalangan menengah ke bawah. Untuk mencukupi kebutuhannya bahkan ada yang rela menjadi buruh di luar jam pekerjaan buruh.

Sebagai pendidik orang yang berintelektak tak lepas dari peserta didik. Secara pendidikan hubungan mereka adalah guru dan siswa. Orangtua harus berperan serta dalam kegiatan siswa dan guru sebagai fasilitator. Silih berganti tahun demi tahun kalangan peserta didik banyak macamnya. Tiap pendidik punya tersendiri untuk mengajarkan siswa agar menjadi pintar dan sukses. Bagi siswa tak lepas dari hukuman bagi siswa yang bermasalah. Sebutan guru, dosen, pengajar itu adalah sama. Menjadi dilema ketika ada peserta didik diajar oleh gurunya dan gurunya adalah orangtua kandung. Peserta didik itu bermasalah dengan guru mata pelajaran lain. Di satu sisi guru 1 dan guru 2 adalah teman sejawat. Ketidakenakan dan perasaan menjadi hal yang momok karena anak didiknya adalah salah satu dari anak keluarga sekolah. Konsekuensi hukum di Negara Indonesia menjadi darah daging dan tercampur pula di kalangan dunia pendidikan. Orangtua yang mungkin tidak mau tercemar nama baiknya karena ulah anaknya. Zaman sekarang dan zaman dulu dalam dunia pendidikan tentang pengajaran terhadap peserta didik sangat berbeda. Peserta didik dulu tahun 70-an dialami pengajaran yang keras. Mulai tahun 2000-an pengajaran berubah seiring perkembangan waktu.

Kurikulum dalam pendidikan dan pengajaran terhadap peserta didik zaman sekarang melalui *pendekatan*. Inilah yang kita pakai terhadap peserta didik yang menonjol baik punya masalah dan kelainan dalam belajar. Tiap sekolah memiliki guru mata pelajaran bidang studi. Salah satu guru yang berperan dalam hal ini adalah guru BP. Guru BP ini harus berperan aktif mengatasi masalah siswa. Banyak kejadian dan sering siswa berbohong pada guru BP yang meminta orangtua siswa datang sekolah. Yang terjadi siswa memiliki alasan yang bermacam-macam sehingga orangtua siswa tidak datang. Orangtua merasa aman-aman saja karena anaknya di sekolah baik-baik tidak mempunyai masalah. Sesungguhnya yang terjadi anaknya bermasalah. Seiringnya waktu hal itu dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi masalah sebagai guru dan siswa seandainya tidak bertanggungjawab. Satu sisi guru BP tidak menangani satu masalah saja tapi ada beberapa yang menjadi kewajiban tugas yang lain. Tetap guru BP harus berusaha menangani masalah itu dan tidak dibiarkan begitu saja. Guru BP dan orangtua menjadi lemah karena satu anak yang bermasalah. Hal itu akan bisa merembet ke siswa lain tapi tidak perlu khawatirkan hal itu semua tergantung siswa yang memang serius dalam belajar.

Peserta didik yang harus memiliki hukuman ditinjau terlebih dahulu. Hukuman itu bukan suatu permainan yang biasa dilakukan dalam Negara Indonesia pada kasus di negeri Indonesia ini. Ini terkait masalah peserta didik dalam dunia pendidikan. Hukuman yang jelas bagi peserta didik ibarat kata” yang dihukum jangan dibuat susah dan yang menghukum jangan menyusahkan diri sendiri.” Hal itu lumrah dan guru menyadari betul hal itu tapi tidak semua guru akan berpikir hal kearah itu. Cara dan tindakan bermacam-macam dipakai oleh guru.

Ciri orang intelek adalah orang yang punya berpenghasilan lebih. Kalimat itu akan menjadi tanda kutip bagi kalangan yang tidak mengerti. Pemahaman tiap pikiran orang berbeda-beda. Bisa dikatakan intelek orang menghasilkan sesuatu, mempunyai kelebihan dalam dirinya sendiri. Kita bisa membuat contoh satu dia guru PAI (Pendidikan Agama Islam), satu sisi lagi dia adalah seorang ustad atau ustadzah (komunitas para kiayai, ulama, dan mungkin sudah naik haji). Kita ketahui guru honor memiliki gaji yang kurang apalagi

punya keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya. Ambil contoh zaman sekarang ustad itu memakai tarif untuk dibayar, memiliki manajer jika ustad itu artis dan guru di sekolah. Melihat ke bawah ustad yang di kampung-kampung yang tidak ada manajer, panggilan biasa, dia seorang guru honor dengan gaji yang tidak seberapa. Kedua ustad itu adalah fenomena yang berbeda. Menjadi jelas orang intelek ini mempunyai peserta didik yang bermasalah. Si orangtua dengan mudahnya hanya memberikan amplop kepada ustad agar permasalahan selesai sampai di sini saja. Semua tergantung orangnya dan kembali pada diri hati nurani. Orang intelek harus mempunyai konsekuensi hukum dan berpendirian kuat terhadap peserta didik menuju jalan yang benar dengan tuntunan Allah swt.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Orang intelek adalah orang yang harus bertanggungjawab pada dirinya sendiri dan masyarakat. Hukuman harus jelas untuk zaman sekarang di tahun 2015 ini terhadap peserta didik. Orang intelek (guru) itu harus menjadi contoh untuk peserta didik. Terkadang orang intelek harus diingatkan kondisi tapi zaman sekarang adalah zaman serba tarif karena uang yang berkuasa.

Menjadi tindakan dan contoh agar bisa diterapkan dan dilakukan pada setiap guru di sekolah khususnya guru BP yaitu :

1. Guru BP diberikan uang transport oleh sekolah untuk berkunjung ke rumah siswa yang bermasalah. Selama ini guru BP mengalami masalah keuangan dalam perjalanan menuju ke rumah siswa karena memakai uang pribadi dan sekolah tidak mau tahu.
2. Orang intelek harus menyadari dan berpikir. Pikiran alam bawah sadar harus bisa dijalankan semaksimal, hati nurani yang berbicara, ingat pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita adalah betul orang intelek yang sebenarnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Google. *Paradigma Pendidikan*. diakses 22 Juni 2012 dari situs <http://wapannuri.com>.

Google. *Paradigma*. diakses 22 Juni 2012 dari situs [mandiknasmen.kemdiknas.go.id](http://mandiknasmen.kemdiknas.go.id).

Pusat Bahasa Departemen Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Dewi Sri Merdekawati Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi  
Universitas Ibn Khaldun